

ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN PEMERINTAH DAN
JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DI JAWA TIMUR

SKRIPSI



Oleh :

Hasan Tarhibul Ulum

0911010057

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR
2013

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN PEMERINTAH DAN
JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DI JAWA TIMUR

Yang diajukan
Hasan Tarhibul Ulum
0911010057

Telah disetujui untuk Ujian Skripsi oleh :

Pembimbing

DR. IGNATIA MARTHA H., SE., ME. Tanggal :
NIP. 196703011991032001

Mengetahui,
A/N Dekan Fakultas Ekonomi
Wakil Dekan I

DRA. EC.A.SUWAIDI,MS
NIP.196003301986031003

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN PEMERINTAH DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI JAWA TIMUR

Disusun oleh :

Hasan Tarhibul Ulum
0911010057

Telah dipertahankan dihadapan
Dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Universitas Pembangunan Nasional “veteran” Jawa Timur
pada tanggal

Pembimbing :
Pembimbing Utama

Tim Penguji
Ketua

DR. IGNATIA MARTHA H., SE., ME.
NIP: 196703011991032001

DR. IGNATIA MARTHA H., SE., ME.
NIP: 196703011991032001

Sekretaris

Dr. MUCHTOLIFAH, SE, MP
195805091987032001

Anggota

DRS. EC. M TAUFIQ, MM
196805011993031004

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jawa Timur

Dr. Dhani Ichsanuddin Nur, SE, MM
196309241989031001

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah rabbil ‘alamin terucap ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan Kekuatan-Nya sehingga dengan segala keterbatasan waktu, tenaga, pikiran dan keberuntungan yang dimiliki peneliti, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan Skripsi “Analisis Pengaruh Penerimaan Pembangunan Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur” tepat waktu.

Adapun maksud penyusunan Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat akademis guna melanjutkan penelitian sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan, walaupun demikian peneliti berupaya menyelesaikannya sebaik mungkin.

Didalam penyusunan skripsi ini peneliti banyak menghadapi kendala dan masalah, akan tetapi atas bantuan dan dorongan dari Ibu Dr. Ignatia Martha Hendrati, SE., ME. selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan banyak pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan Usulan Penelitian ini. Yaitu:

1. Bapak Dr.,Ir. Teguh Sudarto MP. Selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Dr. Dhani Ichsanuddin Nur, SE., MM. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra,Ec. Niniek Imaningsih, MP. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Bapak dan Ibu Pengajar Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah dengan ikhlas memberikan banyak ilmu pengetahuannya selama masa perkuliahan dengan pelayanan akademik bagi peneliti.
5. Ayahanda, ibunda kakak yang telah memberikan motivasi do’a, semangat dan dorongan moral spiritualnya yang tulus kepada peneliti, sehingga peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
6. Rekan – rekan angkatan 2009 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, atas segala bantuan dan dukungannya.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu – per satu yang telah banyak membantu dalam penyelesaian Usulan Penelitian

Akhir kata, semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Usulan Penelitian skripsi ini, sehingga dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Surabaya, 25 November 2013

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Hasil – Hasil Penelitian Terdahulu	9
2.2. Landasan Teori	15
2.2.1 Pendapatan daerah	15
2.2.2 Dana perimbangan	18
2.2.3 Lain-lain pendapatan yang sah	23
2.2.4 Jumlah penduduk	25
2.2.5 Teori Pertumbuhan ekonomi	26
2.3. Kerangka Pemikiran.....	30

2.4. Hipotesis	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35
3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	35
3.1.1. Definisi Operasional.....	35
3.1.2. Pengukuran Variabel.....	35
3.2. Teknik Pengumpulan Data	38
3.3. Teknik Analisis dan Uji Hipotesis	39
3.3.1. Teknik Analisis.....	39
3.3.2. Uji Hipotesis.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA	50
4.1 Deskripsi obyek Penelitian	50
4.1.1 Letak Georafis	50
4.1.2 Ketenaga Kerjaan	51
4.1.3 Keuangan Daerah	52
4.1.4 Perdagangan	53
4.1.5 Pendapatan Regional	54
4.1.6 Pertumbuhan Ekonomi	55
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian	55
4.2.1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah	56
4.2.2 Perkembangan Dana Alokasi Khusus.....	57
4.2.3 Perkembangan Dana Hibah	58
4.2.4 Perkembangan Jumlah Penduduk.....	60
4.2.5 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi	61

4.3 Analisis pengujian Hipotesis	62
4.3.1 Analisis Asumsi Regresi Klasik	62
4.3.2 Analisis Pengujian Hipotesis	67
4.3.3 Uji F	69
4.3.4 Uji Hipotesis secara parsial.....	70
4.3.5 Pembahasan	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	80
5.1 Kesimpulan	80
5.2 Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	vii

LAMPIRAN

ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN PEMERINTAH DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI JAWA TIMUR

Oleh :

HASAN TARHIBUL ULUM

Abstraksi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan output total secara terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi dijadikan sebagai suatu tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ekonomi di suatu wilayah berjalan selama kurun waktu tertentu. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin bergairahnya kegiatan ekonomi di wilayah tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis pengaruh dalam penerimaan pemerintah di Jawa Timur, untuk mengetahui variabel bebas mana yang berpengaruh paling dominan terhadap pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data time series pada tahun 2008-2012. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dan variabel yang digunakan adalah PAD (X_1), DAK (X_2), Dana Hibah (X_3), Jumlah Penduduk (X_4) Dan Pertumbuhan Ekonomi (Y) sebagai variabel terikatnya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, PAD (X_1), DAK (X_2), Dana Hibah (X_3), dan Jumlah Penduduk (X_4) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y), hal ini ditunjukkan $F_{hitung} = 11.495 > F_{Tabel} = 5.857$. Secara parsial, variabel DAK (X_2), Dana Hibah (X_3), dan Jumlah Penduduk (X_4) tidak berpengaruh signifikan dalam Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur (Y). Sedangkan PAD (X_1) berpengaruh signifikan dalam Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur (Y).

Keyword : Pendapatan Asli Daerah, DAK, Dana Hibah, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi dijadikan sebagai suatu tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ekonomi di suatu wilayah berjalan selama kurun waktu tertentu. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin bergairahnya kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dari perkembangan PDRB atas dasar harga konsta dibandingkan tahun sebelumnya. Keuangan Negara meliputi seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan semua hak dan kewajiban Negara. Dan seluruh rangkaian kegiatan ini memiliki akibat-akibat keuangan sehingga memerlukan adanya suatu perencanaan keuangan yang cermat (UU Nomor 47 Tahun 2009).

Salah satu asas pembangunan daerah adalah desentralisasi, menurut ketentuan umum UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perwujudan dari asas desentralisasi adalah berlakunya otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi

pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah harus diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya Nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. (UU No. 32 tahun 2004)

Ketentuan ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang kini telah disempurnakan menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Sedangkan DAU dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional.

DAU suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Data yang digunakan dalam penghitungan DAU diperoleh dari lembaga statistik Pemerintah dan/atau lembaga Pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. (Peraturan Pemerintah No 55 : 2005)

Pembangunan dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Pada hakekatnya, pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya, untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba “lebih baik”, secara material maupun spiritual. Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan ekonomi yang setinggitingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Todaro, 2000).

Penelitian-penelitian terdahulu masih memperdebatkan hubungan Penerimaan pemerintah dan jumlah Penduduk dengan pertumbuhan ekonomi. Perbedaan hubungan yang terjadi pada penelitian terdahulu terkait dengan perbedaan kondisi tiap-tiap daerah yang diteliti.

Proses transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam berbagai bentuk seperti DBH SDA (Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam), DAK (Dana Alokasi Khusus), DAU (Dana Anggaran Umum), Dana Penyesuaian, Dana Insentif Daerah dan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah, membuat proses pembangunan di daerah menjadi tidak optimal. Sementara pada saat yang sama daerah sebagai pelaksana otonomi dianggap justru belum mampu mengelola dana transfer yang sudah diberikan pemerintah itu. Anggapan ketidakmampuan daerah dalam pengelolaan dana transfer selalu terjadi karena selama ini kesempatan daerah untuk membeberkan masalah yang dihadapinya dalam kegiatan transfer dana tidak pernah ada. Daerah hanya mengikuti saja alur yang diperintahkan pusat dalam proses transfer. Padahal, daerah menghadapi banyak masalah dan ketidakberdayaan karena sistem transfer yang dipenuhi berbagai persyaratan. Proses transfer Dana Alokasi Umum juga tak jauh berbeda, dana yang sedianya diperuntukkan untuk daerah namun tidak bisa di transfer begitu saja, karena adanya kewajiban lain, dari dana transfer tertentu (DAK) , PNPM dan lain-lain supaya daerah menyediakan dana pendamping. Dana pendamping itu sangat membebani daerah, karena tidak ada dalam Indikator Kebutuhan Fiskal DAU. Sehingga keberadaan dana pendamping itu tidak dipertimbangkan. Hal ini menyulitkan posisi pemerintah daerah, di satu sisi membutuhkan dana tambahan pembangunan, namun di sisi lain harus mengeluarkan dana pendamping. supaya dana pendamping ditiadakan atau dikonversi ke DAK. bagi daerah-daerah yang PAD dan DBH nya kecil, kehadiran dana pendamping ini sangat mengganggu performa keuangan daerah

pendapatan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Timur secara riil meningkat stabil dengan rata-rata pertumbuhan per tahun 6 persen dari Rp. 33,3 trilyun pada tahun 2006 menjadi Rp. 42,2 trilyun pada tahun 2010. Pendapatan daerah pemerintah provinsi meningkat dari Rp. 6,3 trilyun pada tahun 2006 menjadi Rp. 8,2 trilyun pada tahun 2010. Dari pendapatan daerah tersebut, secara riil komponen DAK meningkat cukup tinggi sekitar 14 persen per tahunnya, dari Rp. 1,1 trilyun pada tahun 2006 menjadi Rp. 1,7 trilyun pada tahun 2010. Komponen PAD mengalami pertumbuhan yang stabil dengan rata-rata 7 persen per tahunnya dari Rp. 7,1 trilyun pada tahun 2006 menjadi Rp. 9,4 trilyun pada tahun 2010. Komponen Dana Bagi Hasil juga meningkat sebesar 10 persen dari Rp. 3,1 trilyun pada 2006 menjadi Rp. 4,5 trilyun pada 2010. Komponen pendapatan daerah lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu kurang lebih 42 persen secara rata-rata per tahun dari Rp. 1,7 trilyun pada tahun 2006 menjadi Rp. 6,4 trilyun pada tahun 2010. Dana DAU mengalami penurunan secara riil semenjak tahun 2009 dari Rp. 21,2 trilyun tahun 2008 menjadi Rp. 20,8 trilyun pada tahun 2009 dan Rp. 19,9 trilyun pada tahun 2010. Ini disebabkan karena penurunan DAU (BAPPENAS 2011)

Simon Kuznets menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh akumulasi modal (investasi pada tanah, peralatan, prasarana dan sarana dan sumber daya manusia), sumber daya alam, sumber daya manusia (human resources) baik jumlah maupun tingkat kualitas penduduknya, kemajuan teknologi, akses pada informasi, keinginan untuk melakukan inovasi dan mengembangkan diri serta budaya kerja (Todaro, 2000).

Tabel 1 : Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur 2006-2011

Tahun	PDRB (ADHB)	Laju Pertumbuhan
2006	470627493,61	5,8
2007	536981881,91	6,11
2008	621391674,61	5,94
2009	686847557,72	5,01
2010	778565772,46	6,68
2011	884143574,81	7,22

Sumber : PDRB Jawa Timur, BPS Provinsi Jawa Timur, 2006 - 2011

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur, selama kurun waktu 2006 - 2011 secara umum mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari besarnya PDRB Provinsi Jawa Timur, berdasarkan harga berlaku rata-rata PDRB terus meningkat dengan diimbangi laju pertumbuhan ekonomi yang juga meningkat. Tahun 2011 adalah tahun yang paling mengalami laju Pertumbuhan yang Tinggi yaitu 7,22 %.

Menurut Malthus pertumbuhan penduduk saja tidak cukup untuk berlangsungnya pembangunan ekonomi. Malahan, pertumbuhan penduduk adalah akibat dari proses pembangunan. Malthus juga mengatakan bahwa “pertambahan penduduk tidak bisa terjadi tanpa peningkatan kesejahteraan yang sebanding”. Jika tingkat akumulasi modal meningkat, permintaan atas tenaga kerja juga meningkat. Kondisi mendorong pertumbuhan penduduk. Akan tetapi pertumbuhan penduduk saja tidak meningkatkan kesejahteraan. Pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kesejahteraan hanya bila pertumbuhan tersebut meningkatkan permintaan efektif (effective demand) yaitu permintaan atas sejumlah barang/jasa yang disertai dengan

kemampuan untuk membayar harganya. Permintaan efektif akan membentuk harga dipasar atau menyebabkan transaksi jual beli di pasar. Permintaan efektif inilah yang akan membentuk harga pasar atau harga keseimbangan (Jhingan,2004:97)

1.2 Perumusan Masalah

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa keuangan negara ada penerimaan dan pengeluaran. Sedangkan penerimaan terdiri dari PAD, Dana Perimbangan, Pendapatan Lain yang Sah. Adapun masalah pokok penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tiimur?
3. Apakah Dana Hibah berpengaruh pada Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur?
4. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh pada Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli daerah Pada Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Pada Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Dana Hibah pada Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh jumlah penduduk Pada Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan informasi dan masukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam merumuskan kebijakan dan mencari solusi yang tepat dalam pengelolaan keuangan daerah di Jawa Timur, utamanya dalam mengambil kebijakan dalam penerimaan pembangunan pemerintah.
2. Dapat dijadikan indikator untuk mengevaluasi kebijakan Penerimaan Pembangunan dalam pengelolaan keuangan daerah yang diterapkan di Jawa Timur.